

2.00.7.00

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

KP3B - Kawasan Publik Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Naser Al Bantani Curug - Serang
Telp. (0254) 8220071 Fax. (0254) 8220072

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT atas segala rahmat dan karuniaNya kepada kita, Alhamdulillah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Selain itu, laporan ini memuat berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten melalui program dan kegiatan serta belanja aparatur Tahun Anggaran 2018 dalam upaya melaksanakan urusan pada bidang industri dan perdagangan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten merupakan upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari perwujudan Visi dan Misi Gubernur Banten.

Atas semua bantuan semua pihak kami ucapkan terimakasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam laporan ini.

Serang, Januari 2019
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten,


H. Babar Suharso, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 199603 1 004



EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh satuan organisasi/kerja pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 merupakan bagian dari impelmentasi Rencana Strategis 2017 – 2022 yang telah menjadi komitmen bersama seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Setelah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan dilaksanakan untuk menilai peran dan kontribusi Disperindag Provinsi Banten terhadap Pemerintah Provinsi Banten dalam mencapai Program Prioritas Daerah sebagai fokus pembangunan tahun 2017 – 2022 di Provinsi Banten.

Dasar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tahun 2018 adalah indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Berdasarkan ketiga ukuran keberhasilan kinerja maka sasaran evaluasi hasil kinerja dilakukan terhadap (1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan, (2) Penggunaan Anggaran (3) Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan (4) Penilaian dari *stakeholders*. Penilaian dari *stakeholders* menjadi salah satu dasar pelaksanaan evaluasi kinerja, disamping data yang diterbitkan BPS, perkembangan APBD, LKIP Pemerintah Provinsi Banten serta data, publikasi dan informasi lainnya.

Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik melalui 7 (tujuh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Akan tetapi hasil yang sudah maksimal ini

akan terus dipertahankan serta terus diperbaiki pada masa yang akan datang sebagai wujud kesinambungan pembangunan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten didukung oleh anggaran belanja langsung Rp. 90,711,880,000,- (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dan belanja tidak langsung Rp. 15,468,000,000,- (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*) sehingga total anggaran Rp. 106,179,880,000.- (*Seratus Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 35,638,018,095.- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 33.56%.

Sisa anggaran pembangunan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a) Terdapat efisiensi belanja dari beberapa kegiatan;
- b) Pengadaan lahan PDP yang tertunda karena keterbatasan waktu penyelesaian;
- c) Belum maksimalnya perencanaan program dan kegiatan yang berkorelasi dan terintegrasi dengan target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Tahun 2017 - 2022;

Keberhasilan kinerja sektoral yang dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sangat didukung beberapa faktor antara lain program/kegiatan dekonsentrasi dari Kementerian terkait, sumber daya manusia, kemampuan sumber dana yang disediakan Pemerintah Provinsi Banten, *stakeholders*, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta dunia usaha dan masyarakat pada tahun 2018.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten akan terus berupaya mengoptimalkan kinerja di masa yang akan datang serta mengembangkan potensi sebagai sumberdaya pembangunan khususnya yang menjadi tugas pokok, fungsi dan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Banten.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Uraian Tugas	5
1.4 Unit Pelaksana Teknis Dinas	7
1.5 Sumber Daya Manusia	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022	12
2.2 Rencana Kerja Tahun 2018	20
2.3 Perjanjian Kinerja	27
2.4 Rencana Anggaran	31
2.5 Kegiatan Dekonsentrasi.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	35
3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2018.....	37
3.3 Akuntabilitas Keuangan	64
3.4 Sumber Daya Manusia	68
BAB IV PENUTUP	
4.1 Permasalahan	73
4.2 Rekomendasi Solusi	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2018	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022.....	14
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017-2022.....	15
Tabel 2.3	Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017-2022.....	18
Tabel 2.4	Target Kinerja Sasaran dan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.....	20
Tabel 2.5	Target Kinerja Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.....	21
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.	27
Tabel 2.7	Rencana Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.....	31
Tabel 2.8	Rencana Anggaran Per Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.....	31
Tabel 2.9	Rencana Anggaran Per Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.....	32
Tabel 2.10	Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.....	33
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	35
Tabel 3.1a	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2018.....	37
Tabel 3.2	Perhitungan Nilai IKM Tahun 2018.....	39
Tabel 3.3	IKM yang mendapatkan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Tahun 2018.....	48
Tabel 3.4	Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Provinsi Banten Januari - Desember Tahun 2018.....	50
Tabel 3.5	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Bahan Kebutuhan Pokok di Provinsi Banten.....	51
Tabel 3.6	Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok Tahun 2018.....	52

Tabel 3.7	Pertumbuhan Omset Pedagang (Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten) Tahun 2018.....	55
Tabel 3.8	Prognosa Ketersediaan Bahan Pokok Tahun 2018 di Provinsi Banten.....	57
Tabel 3.9	Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017 dan 2018.....	58
Tabel 3.10	Rincian Ekspor Non Migas Provinsi Banten (Januari - Desember 2017 dan Januari - Desember 2018).....	60
Tabel 3.11	Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Banten Triwulan III dan IV 2018.....	61
Tabel 3.12	Persentase Pelayanan Sertifikasi dan Mutu Barang Tahun 2017 - 2022.....	63
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018.....	64
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018.....	64
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Belanja per Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.....	65
Tabel 3.16	Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan/Status.....	69
Tabel 3.17	Kekuatan Pegawai Berdasarkan Unit Kerja.....	69
Tabel 3.18	Kondisi Tingkatan Jabatan Pejabat Struktural.....	70
Tabel 3.19	OPD Kab./Kota yang membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Grafik Harga Rata - rata Telur, Daging Ayam dan Daging Sapi Periode Januari - Desember 2018.....	53
Gambar 3.2	Grafik Harga Rata - rata Beras Periode Januari - Desember 2018.....	53
Gambar 3.3	Grafik Harga Rata - rata Cabe dan Bawang Periode Januari - Desember 2018.....	54
Gambar 3.4	Grafik Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.....	4
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB).....	8
Bagan 1.3	Struktur Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah perangkat daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas membantu gubernur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan rencana pembangunan industri provinsi;
2. Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
3. Penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar;
4. Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
6. Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) took bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
7. Penerbitan rekomendasi surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
8. Penetapan rekomendasi untuk penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP);
9. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);

10. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
11. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
12. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi;
13. Penyelenggaraan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
14. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
15. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
16. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi);
17. Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

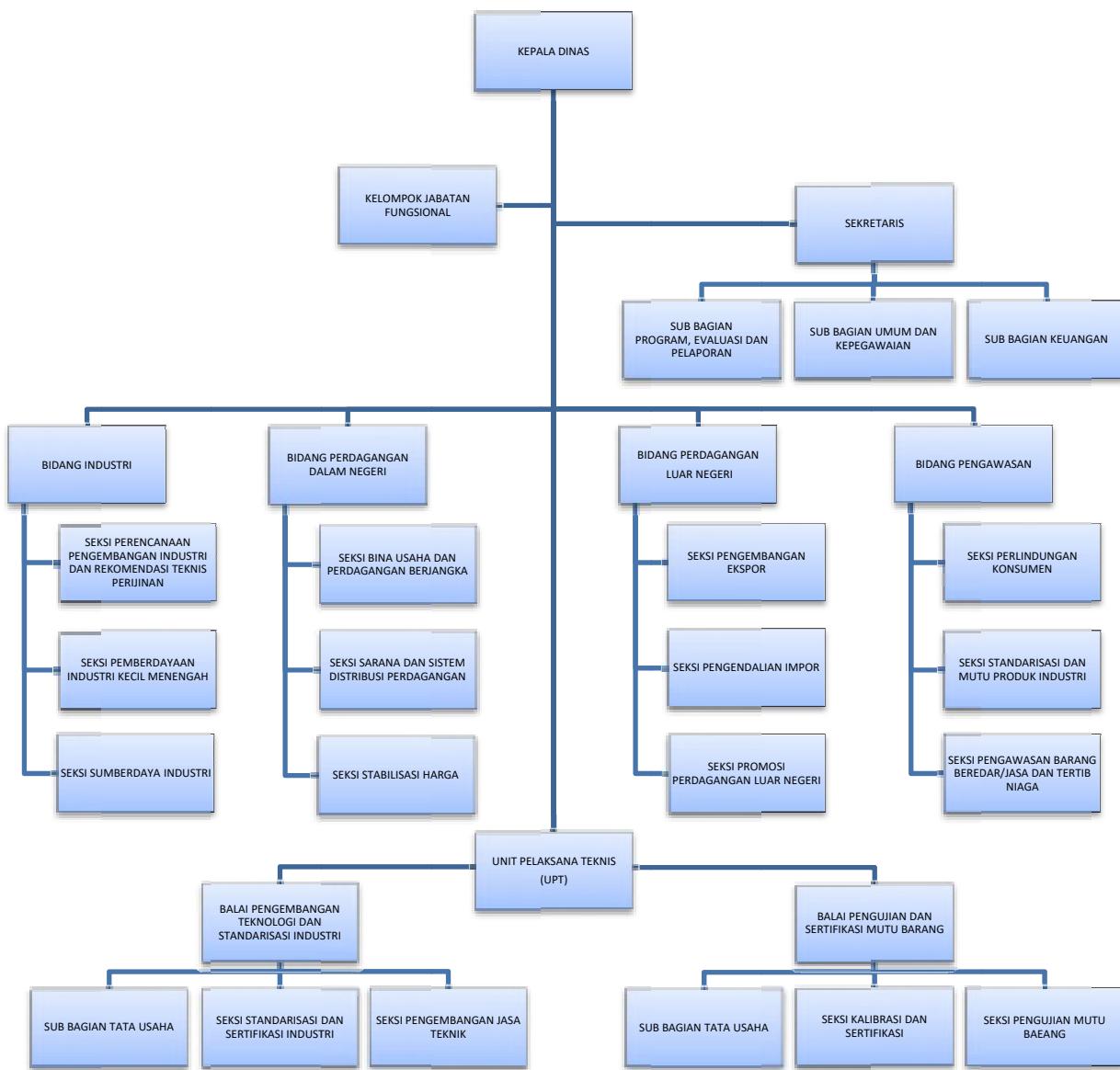
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala, yang dibantu oleh seorang Sekretaris, empat orang Kepala Bagian dan dua orang Kepala Balai (Unit Pelaksana Teknis) yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembidangan tugas masing - masing unsur Sekretariat, Bidang dan Balai adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang membawahakan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keaparaturan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan
 - b. Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
 - c. Seksi Sumberdaya Industri
3. Bidang Pengawasan, yang membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Konsumen
 - b. Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri
 - c. Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahkan:
 - a. Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka
 - b. Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan
 - c. Seksi Stabilisasi Harga
5. Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Ekspor
 - b. Seksi Pengendalian Impor
 - c. Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari:
 - a. Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (BPTSI)
 - b. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
7. Jabatan Fungsional

Bagan 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018



1.3 URAIAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah. Tugas pokok masing - masing unit kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten adalah:

1. Sekretaris, membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan keparaturan, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan. Sekretaris membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keaparaturan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, karsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi keaparaturan dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
2. Kepala Bidang Industri, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan, Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Seksi Sumberdaya Industri. Kepala Bidang Industri membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan.
 - b. Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah.

- c. Seksi Sumberdaya Industri, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sumberdaya Industri.
3. Kepala Bidang Pengawasan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen, Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri serta Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga. Kepala Bidang Pengawasan membawahkan:
- a. Seksi Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen.
 - b. Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri.
 - c. Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga.
4. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka, Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan serta Seksi Stabilisasi Harga. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahkan:
- a. Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka.
 - b. Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

- koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan.
- c. Seksi Stabilisasi Harga, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Stabilisasi Harga.
5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Ekspor, Seksi Pengendalian Impor dan Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri.yang membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Ekspor, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Ekspor.
 - b. Seksi Pengendalian Impor, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Impor.
 - c. Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri.

1.4 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten membawahkan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Balai Pengelolaan Teknologi dan Standarisasi Industri (BPTSI).

1.4.1 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

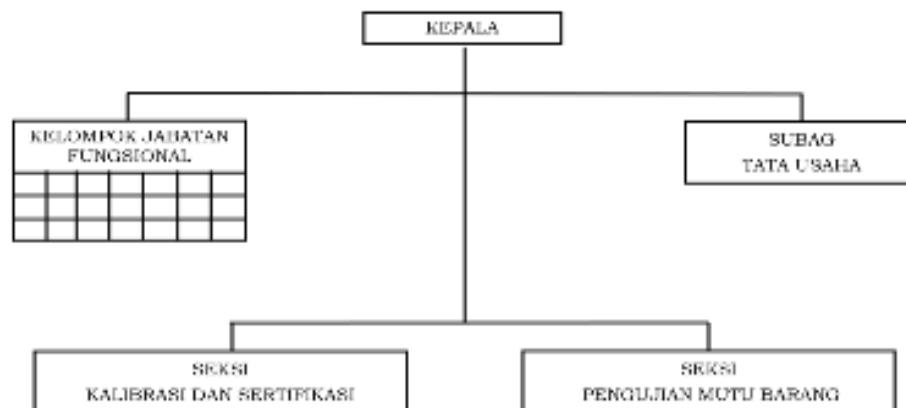
Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pelayanan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- b. Penyelenggaraan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- d. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) ditunjukkan pada bagan berikut:

Bagan 1.2
Struktur Organisasi
Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)



Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pelayanan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang. Kepala BPSMB membawahkan:

1. Subbag Tata Usaha dengan tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi Balai;
2. Seksi Kalibrasi dan Sertifikasi dengan tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan teknis operasional kalibrasi dan sertifikasi;
3. Seksi Pengujian Mutu Barang dengan tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan teknis operasional pengujian mutu barang;
4. Kelompok jabatan fungsional.

1.4.2 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARISASI INDUSTRI

Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

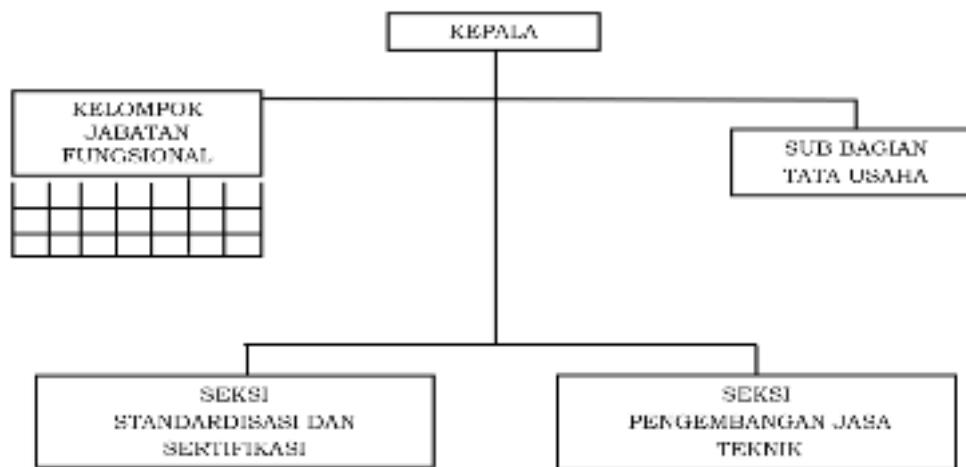
Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengembangan teknologi dan standarisasi bagi industri khususnya industri mikro kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, rekayasa teknologi dan standarisasi industri;
- c. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi industri;
- d. Pelaksanaan pengujian mutu industri;
- e. Pelaksanaan pelayanan klinik HaKI;
- f. Pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;
- g. Pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan teknologi dan standarisasi industri;
- h. Pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi dan standarisasi industri;
- i. Pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan standarisasi industri.

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (BPTSI) ditunjukkan pada bagan berikut:

Bagan 1.3
Struktur Organisasi
Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri



Kepala Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (BPTSI), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengembangan teknologi dan standarisasi bagi industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Kepala BPTSI membawahkan:

1. Subag Tata Usaha, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi Balai;
2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan teknis operasional standarisasi dan sertifikasi;
3. Seksi Pengembangan Jasa Teknik, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan teknis operasional pengembangan jasa teknik;
4. Kelompok jabatan fungsional.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang merupakan salah satu perangkat daerah didukung oleh sejumlah personil atau aparatur yang mengemban tugas dan fungsinya. Pada tahun 2018 jumlah aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten adalah 175 orang dengan status keaparaturan terdiri dari 86 orang Aparatur Negeri Sipil (PNS) dan 89 orang TKK/TKS.

Komposisi aparatur berdasarkan tingkat golongan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten berdasarkan Jabatan dan Golongan
Tahun 2018

No.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	4	4
4.	Kepala Balai	-	-	-	1	1
5.	Kepala Sub Bagian	-	-	3	1	4
6.	Kepala Seksi	-	-	12	4	16
7.	Pelaksana PNS	1	15	44	-	60
8.	Pelaksana TKK/TKS	-	-	-	-	89
TOTAL		1	15	59	12	175

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018

Pada tahun 2018, jabatan Kepala UPT dan Kepala Subbag Tata Usaha Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dikosongkan karena pejabat yang bersangkutan memasuki masa paripurna (pensiun) **per 31 Desember 2018**.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2017 - 2022

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 telah ditetapkan Visi Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Dalam upaya mendukung keberhasilan visi tersebut, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten adalah:

1. Misi Pertama, **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**. Tujuan misi ke-1 adalah terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.
2. Misi Kelima, **Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**. Tujuan misi ke-5 adalah meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, Misi Pertama dan Misi Kelima memiliki prioritas unggulan yaitu:

- a) Misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki prioritas unggulan antara lain:
 1. Penerapan e-planning, e-monev dan e-budgeting;
 2. Reformasi birokrasi;
 3. Penerapan manajemen kinerja (peningkatan predikat LKIP dari CC ke BB);
 4. Reformasi tata kelola keuangan (peningkatan predikat dari Desclaimer/WDP ke WTP);
 5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan publik;
 6. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
 7. Perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten/kota.
- b) Misi meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi memiliki prioritas unggulan antara lain:

1. Penciptaan iklim investasi melalui perbaikan perizinan, infrastruktur, regulasi tenaga kerja, fasilitasi sumber energi dan menciptakan keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan daya saing daerah;
2. Pengendalian inflasi daerah;
3. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin khususnya petani dan nelayan;
4. Pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata;
5. Peningkatan tata kelola APBD untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta fungsi APBD dalam hal distribusi dan alokasi.

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran dengan perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu:

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

2. Meningkatnya industri manufaktur dan perdagangan yang berdaya saing.

Sasaran:

a) Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM;

b) Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah serta wirausaha baru sektor perdagangan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2017 - 2022 memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
1.1		Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkannya paratur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	B	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Industri Manufaktur dan Perdagangan Yang Berdaya Saing		LPE	6	6.2	6.4	6.7	7
			Daya beli / Inflasi	3.7	4.2	4	4	4
			TPT	8.45	8.2	7.95	7.68	7.4
2.1		Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah, nilai tambah industri	LPE Sektor Perindustrian	3.7	3.95	4.2	4.45	4.7

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
		berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM						
2.2		Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah serta wirausaha baru sektor perdagangan	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4	4	4	4	4
			LPE Sektor Perdagangan	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9

Sumber: Renstra Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017 -2022

2.1.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan yang merujuk pada Renstra Tahun 2017 - 2022 telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Arah kebijakan memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis serta mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022

VISI	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH
------	---

MISI I		MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

VISI		BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH					
MISI V		MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatnya Industri Manufaktur dan Perdagangan yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM	1	Meningkatkan capaian pembangunan industri yang didorong pengembangan industri, pemberdayaan industri kecil serta peningkatan kualitas sumber daya industri	1.1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan kemitraan strategis, penambahan sarana pendukung dan pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan pertumbuhan industri
						1.2	Peningkatan penyelesaian sengketa konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar

VISI	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH					
MISI V	MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
	2	Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah serta wirausaha baru sektor perdagangan	2.1	Meningkatkan pertumbuhan perdagangan yang didorong pengadaan sarana prasarana perdagangan, meningkatkan usaha perdagangan dalam negeri dan upaya untuk dapat menstabilkan harga	1	Peningkatan sarana prasarana perdagangan, peningkatan akses pasar, peningkatan kesadaran produk dalam negeri, pengamanan produk dan tata niaga serta penguatan pasar domestik untuk mencapai pertumbuhan
			2.2	Meningkatkan capaian perdagangan luar negeri dengan meningkatkan pengembangan produk orientasi ekspor yang didukung produk berkualitas dan promosi pemasaran perdagangan luar negeri	1	Peningkatan kualitas produk unggulan ekspor yang ditunjang dengan pemahaman transaksi luar negeri, akses jaringan kerjasama pemasaran internasional dan akses permodalan untuk mencapai target transaksi luar negeri
			2.3	Meningkatkan daya saing produk berbasis keunggulan lokal	1	Peningkatan standarisasi, mutu produk, kelembagaan dan regulasi pro konsumen

Sumber: Renstra Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017 -2022

2.1.3 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menetapkan 7 (tujuh) program sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2017 - 2022, yaitu:

1. Program Tata Kelola Pemerintahan;
2. Program Peningkatan Daya Saing Industri;
3. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri;
4. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
5. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri;
7. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

Setiap program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memiliki target kinerja yang terukur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kegiatan Prioritas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Berdasarkan Renstra Tahun 2017 - 2022

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
		3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
		4	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
		6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
		7	Peningkatan Kapasitas Aparatur
		8	Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah
		9	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		11	Penyediaan Barang dan Jasa

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
			Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		13	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		15	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		16	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Program Peningkatan Daya Saing Industri	1. Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguanan	1	Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahkan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan
	2. Rasio Pertumbuhan industri kreatif	1	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
	3. Persentase Kerjasama SDM Berkompotensi Industri yang Aktif	1	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	1. Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan Bersertifikasi	1	Standarisasi dan Sertifikasi Industri
		2	Pengembangan dan Peningkatan Produk Industri
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1. Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	1	Pengendalian Inflasi Daerah
	2. Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok	1	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	3. Pertumbuhan Omset Pedagang	1	Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka
	4. Neraca Ketersediaan Barang Pokok	1	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN
Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1. Surplus Neraca Perdagangan	1	Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
		2	Pengendalian Impor Daerah
		3	Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	1. Indeks Tendensi Konsumen	1	Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri
		2	Peningkatan Perlindungan Konsumen
		3	Peningkatan Pengawasan BarangBeredar/Jasa dan Tertib Niaga
Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1. Persentase Pelayanan Sertifikasi dan Standarisasi	1	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi
		2	Peningkatan Pelayanan Mutu Barang

Sumber: Renstra Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017 -2022

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2018

Mengacu pada Renstra Tahun 2017 - 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan target kinerja pada tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Target Kinerja Sasaran dan Program
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

NO	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET TAHUN 2018
I	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	C	B
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.5	2.8
II	LPE Sektor Perindustrian	3.05	3.7
	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang	0	20

NO	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET TAHUN 2018
	Mendapatkan Fasilitasi Penguatan		
	Rasio Pertumbuhan industri kreatif	0	20
	Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif	0	20
	Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan Bersertifikasi	1200	200
III	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	4
	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	0	5
	Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok	6.93	5
IV	LPE Sektor Perdagangan	3.82	4.9
	Pertumbuhan Omset Pedagang	5	10
	Neraca Ketersediaan Barang Pokok	100	100
	Surplus Neraca Perdagangan	2828.83	2970.27
	Indeks Tendensi Konsumen	104.65	108
	Persentase Pelayanan Sertifikasi dan Standarisasi	0	20

Sumber: Renstra Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017 -2022

Dalam upaya mencapai target kinerja sasaran dan program maka diformulasikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018. Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja 2018 memiliki target sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target Kinerja Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan/Tolok Ukur	Target Kinerja
	Program: Tata Kelola Pemerintahan	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
	1. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 Dokumen
	2. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dokumen

No.	Program/Kegiatan/Tolok Ukur	Target Kinerja
	3. Penyusunan Tindak Lanjut Pemriksaan (TLHP) dan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	1. Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen
	2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen
	3. Penyusunan Laporan Evaluasi Pengendalian	5 Dokumen
	4. Monitoring dan Evaluasi	4 Dokumen
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	
	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
	2. Pengadaan Lahan Pusat Distribusi Provinsi	1 Paket
	3. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket
	4. Pengadaan Kontruksi Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	1 Paket
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
	1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan
	2. Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan
	3. Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor	12 Bulan
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
	1. Operasional Tidak Tetap	12 Bulan
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	12 Bulan
	3. Penyediaan Barang Pakai Habis	12 Bulan
	4. Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan
	5. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan
	6. Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan
	7. Pelaksanaan HUT Banten dan Banten EXPO	1 Kegiatan
	8. Penyediaan BBM	12 Bulan
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
	1. Pembinaan Pegawai	25 Orang
7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	
	1. Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan
	2. Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan
8	Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	
	1. Pengadaan Alat Pengujian	1 Paket
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	

No.	Program/Kegiatan/Tolok Ukur	Target Kinerja
	1. Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan
	2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan
	3. Pemeliharaan Inventaris Kantor	12 Bulan
10	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	
	1. Operasional Kantor Tidak Tetap	12 Bulan
	2. Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan
	3. Penyediaan Makan dan Minum BPTSI	12 Bulan
	4. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet, dan PBHI/PBHN	12 Bulan
	5. Penyediaan BBM	12 Bulan
	6. Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	1. Operasional Tidak Tetap	12 Bulan
	2. Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12 Bulan
	3. Penyediaan Barang Pakai Habis	12 Bulan
	4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan
	5. Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan
	6. Penyediaan BBM	12 Bulan
	7. Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	1. Pemeliharaan Kendaraan Kantor	12 Bulan
	2. Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK	12 Bulan
	3. Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor	12 Bulan
14	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	
	1. Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	2 Dokumen
	2. Pembuatan Visualisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	1 Dokumen
	3. Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	12 Bulan
	4. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik	2 Dokumen
	5. Pengelolaan PPID	12 Bulan

No.	Program/Kegiatan/Tolok Ukur	Target Kinerja
15	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	
	1. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan
	2. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan
16	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	1. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan
	2. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan
	Program: Peningkatan Daya Saing Industri	
17	Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri	
	1. Pengawasan Produk Industri SNI Wajib di Provinsi Banten	50 Produk & Industri
	2. Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib	40 Industri
18	Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahkan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan	
	1. Fasilitasi pengembangan Sentra IKM	2 Dokumen
	2. Kajian Pengembangan Kawasan/Sentra Industri	2 Dokumen
	3. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Industri	1 Dokumen
	4. Peningkatan Kerjasama Penelitian IPTEK Industri	5 Dokumen
	5. Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri	50 Perusahaan
	6. Kajian Galeri Industri (Industri Kreatif)	1 Dokumen
	7. Kajian Pemanfaatan Lahan Industri	1 Dokumen
19	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	
	1. Fasilitasi pengembangan Sentra IKM	175 Orang
	2. Terlaksananya Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM	2 Sentra
	3. Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota	2 Kegiatan
20	4. Terlaksananya Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten	40 IKM
	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	
	1. Pengembangan Industri Kreatif	1 Kegiatan
	2. Peningkatan Nilai Tambah Produk	20 Produk
	3. Penyusunan Kajian Standar Kompetensi Industri	1 Dokumen
	4. Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan untuk Sumber Daya Lokal	2 Kegiatan
	5. Pengembangan Hilirasi IKM terhadap Industri Besar	1 Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Tolok Ukur	Target Kinerja
	6. Kerjasama link and Match industri dan SMK	18 Industri
	Program: Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	
21	Pengembangan dan Peningkatan Produk industri	
	1. Pelayanan Rumah Kemasan	200 Produk
	2. Pengadaan Peralatan dan Mobil Kemasan	1 Paket
22	Standarisasi dan Sertifikasi Industri	
	1. Pelayanan Standardisasi dan Sertifikasi Uji Mutu Produk Industri Bahan Bangunan	50 Produk
	2. Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Industri Pangan	50 Produk
	3. Fasilitasi Hki, Uji Umur Simpan, PIRT dan halal	80 Produk
	Program: Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
23	Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka	
	1. Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka	3 Kegiatan
	2. Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan	2 kegiatan
	3. Kerjasama UKM dan Pengusaha Ritel	1 dokumen
	4. Misi Dagang Lokal	5 pelaku usaha
	5. Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional	10 pelaku usaha
	6. Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang	10 pelaku usaha
24	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan	
	1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Banten	2 Dokumen
	2. Rapat Koordinasi Pendataan Sarana Perdagangan	2 Kegiatan
	3. Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 Kegiatan
	4. Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1 Kegiatan
	5. Bimtek UKM/Pedagang Pasar di Provinsi Banten	2 Kegiatan
	6. Bimtek Pengelolaan Pasar bagi Pengelola Pasar	2 Kegiatan
25	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
	1. Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten	9 Kegiatan
	2. Pemantauan Harga Dan Persediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	3 Kegiatan
	3. Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis Di Provinsi Banten	3 Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Tolok Ukur	Target Kinerja
	4. Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan Pokok Masyarakat	2 Kegiatan
	5. Forum Komunikasi Perpupukan di Provinsi Banten (Data dan Informasi Pupuk Bersubsidi)	1 Kegiatan
26	Pengendalian Inflasi Daerah	
	1. Rapat Koordinasi Triwulan	4 Kegiatan
	2. Capacity Building TPID Prov Banten	2 Kegiatan
	3. Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan	1 Kegiatan
	4. Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah	12 Bulan
	Program: Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
27	Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah	
	1. Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten	1 Dokumen
	2. Pengembangan Produk Ekspor	4 Produk
	3. Analisa Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing	1 Dokumen
	4. Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM	5 Produk
	5. Penyediaan dan penyebarluasan informasi produk potensial daerah dan informasi pasar luar negeri	1 Paket
28	Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah	
	1. Pengendalian Impor Daerah	5 Kegiatan
	2. Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten	12 Bulan
29	Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri	
	1. Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pameran Dagang Nasional	1 Kegiatan
	2. Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pameran Dagang Internasional	18 Pelaku Usaha
	3. Misi Dagang Produk Ekspor	1 Kegiatan
	Program: Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	
30	Peningkatan Perlindungan Konsumen	
	1. Edukasi Perlindungan Konsumen	1 Paket
	2. Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	12 Bulan
31	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga	
	1. Peningkatan pengawasan barang beredar/Jasa dan Tertib Niaga	12 Bulan
	2. Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan	12 Bulan

No.	Program/Kegiatan/Tolok Ukur	Target Kinerja
	Pengendalian Bahan Berbahaya (B2)	
	Program: Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
32	Peningkatan Pelayanan Mutu Barang	
	1. Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	12 Bulan
33	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi	
	1. Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi	12 Bulan

Sumber: Renja Disperindag Provinsi Banten Tahun 2018

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Komitmen antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Gubernur Banten dalam mengupayakan capaian sasaran kinerja tertuang dalam dokumen perjanjian kerja. Perjanjian kinerja meliputi komitmen antara Kepala Dinas terhadap Gubernur (indikator sasaran), Pejabat Esselon III terhadap Kepala Dinas (indikator program) dan Pejabat Esselon IV terhadap Pejabat Esselon III (kegiatan). Perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

SASARAN/ PROGRAM	PERJANJIAN KINERJA		KEGIATAN	
	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TARGET		
Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	B		
Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.8	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
			2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
			3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

SASARAN/ PROGRAM	PERJANJIAN KINERJA		KEGIATAN
	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TARGET	
		4	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
		6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
		7	Peningkatan Kapasitas Aparatur
		8	Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah
		9	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		11	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
		13	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		15	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

SASARAN/ PROGRAM	PERJANJIAN KINERJA		KEGIATAN	
	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TARGET		
				pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM	LPE Perindustrian Sektor	3.7	16	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Program Peningkatan Daya Saing Industri	1. Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan	20	1	Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahkan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan
			2	Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri
	2. Rasio Pertumbuhan industri kreatif	20	1	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
	3. Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif	20	1	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	4. Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan Bersertifikasi	200	1	Standarisasi dan Sertifikasi Industri
Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisien dan efektivitas sistem distribusi daerah serta wirausaha baru sektor perdagangan	Tingkat inflasi bahan pokok dan bahan penting	4	2	Pengembangan dan Peningkatan Produk Industri
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1. Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	5	1	Pengendalian Inflasi Daerah

SASARAN/ PROGRAM	PERJANJIAN KINERJA		KEGIATAN	
	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TARGET		
	2. Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok	5	1	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	LPE Sektor Perdagangan	4.9		
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1. Pertumbuhan Omset Pedagang	10	1	Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka
	2. Neraca Ketersediaan Barang Pokok	100	1	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	3. Surplus Neraca Perdagangan	2970.27	1	Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
			2	Pengendalian Impor Daerah
			3	Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	4. Indeks Tendensi Konsumen	108	1	Peningkatan Perlindungan Konsumen
			2	Peningkatan Pengawasan BarangBeredar/Jasa dan Tertib Niaga
Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	5. Persentase Pelayanan Sertifikasi dan Standarisasi	20	1	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi
			2	Peningkatan Pelayanan Mutu Barang

Sumber: Renja Disperindag Provinsi Banten Tahun 2018

2.4 RENCANA ANGGARAN

Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten mengelola APBD sebesar Rp. 117,371,093,080,- setelah APBD Perubahan anggaran yang dikelola menjadi Rp. 106,179,880,000,-. Apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2017 dengan anggaran Rp. 34,453,700,775,- maka anggaran yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten mengalami kenaikan mencapai 208% (dua ratus delapan persen). Rincian rencana belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Rencana Anggaran Belanja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

NO.	SUMBER ANGGARAN	PAGU (Rp.)
1.	Total Anggaran	106,179,880,000,-
1.1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	15,468,000,000,-
1.2	Belanja Langsung (BL)	90,711,880,000,-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Tahun 2018

Tabel 2.8

Rencana Anggaran Per Program
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Tata Kelola Pemerintahan	82,305,688,350,-
2	Peningkatan Daya Saing Industri	2,087,095,000,-
3	Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	952,067,150,-
4	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1,807,687,500,-
5	Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1,071,557,000,-
6	Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	1,705,535,000,-
7	Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	782,250,000,-
	JUMLAH	90,711,880,000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Tahun 2018

Tabel 2.9

Rencana Anggaran Per Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Tata Kelola Pemerintahan	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	60,342,800
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	236,089,400
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	70,532,190,920
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	788,762,500
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,132,766,000
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	147,300,000
7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	2,137,842,680
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	296,000,000
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	333,864,000
10	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	984,256,700
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	350,807,650
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1,059,252,700
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	269,625,000
14	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	597,513,000
15	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	186,650,000
16	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	192,425,000
	Peningkatan Daya Saing Industri	
17	Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahkan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan	450,660,000
18	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	719,425,000
19	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	917,010,000
20	Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri	233,045,000
	Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	
21	Pengembangan dan Peningkatan Produk industri	522,067,150
22	Standarisasi dan sertifikasi Industri	430,000,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
23	Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka	391,795,500
24	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan	575,320,000
25	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	608,980,000
26	Pengendalian Inflasi Daerah	231,592,000
	Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
27	Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah	309,888,000
28	Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah	209,984,000
29	Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri	551,685,000
	Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	
30	Peningkatan Perlindungan Konsumen	1,280,000,000
31	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga	192,490,000
	Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
32	Peningkatan Pelayanan Mutu Barang	393,500,000
33	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi	388,750,000
	TOTAL	106,179,880,000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Tahun 2018

2.5 KEGIATAN DEKONSENTRASI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tidak hanya melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber pada Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, rincian rencana program dan kegiatan Dana Dekonsentrasi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PEMBERI DANA DEKONSENTRASI	PAGU ANGGARAN (Rp.)
-----	---------	----------	-------------------------------------	---------------------

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PEMBERI DANA DEKONSENTRASI	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	Ditjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian R.I	1,389,000,000
2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan R.I	885,383,000,-
3	Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan R.I	592,182,000,-
	TOTAL			2,866,565,000,-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melakukan upaya - upaya dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Target dan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2018

NO	SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018
I	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	C	B	B	100%
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.5	2.8	3.36	120%
II	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM	LPE Sektor Perindustrian	3.05	3.7	3.61	97.57%

NO	SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018
		Program Peningkatan Daya Saing Industri	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguanan	0	20	30	150%
			Rasio Pertumbuhan industri kreatif	0	20	20	100%
			Persentase Kerjasama SDM Berkompotensi Industri yang Aktif	0	20	24	120%
		Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan Bersertifikasi	1200	200	359	179.5%
III	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah serta wirausaha baru sektor perdagangan	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	4	2.47	100% Inflasi Terkendali
		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	0	5	1.65	Harga Stabil
			Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok	6.93	5	1.22	Harga Stabil
			LPE Sektor Perdagangan	3.82	4.9	7.25	147.96%

NO	SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018
			Pertumbuhan Omset Pedagang	5	10	21.23	212%
			Neraca Ketersediaan Barang Pokok	100	100	100	100%
		Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Surplus Neraca Perdagangan	2828.83	2970.27	(950.77)	Defisit
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	Indeks Tendensi Konsumen	104.65	108	111.35	103.1%
		Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Percentase Pelayanan Sertifikasi dan Standarisasi	0	80	80	100%

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Secara umum, hasil pengukuran indikator menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018. Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang berbeda dengan IKU tahun 2018. Namun, IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan indikator yang bersifat makro sehingga dapat dibandingkan dengan tahun 2017, yakni:

Tabel 3.1a
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2018

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
I	Meningkatnya kesekretariatan mengarahkan aparatur pada pencapaian penyelenggaraan pemerintahan	kualitas dengan kinerja Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	C	B
II	Meningkatnya perkembangan	LPE Sektor	3.05	3.8

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
	Industri Kecil dan Menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM	Perindustrian		
III	Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah serta wirausaha baru sektor perdagangan	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	2.47
		LPE Sektor Perdagangan	3.82	7.25

3.2.1 CAPAIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang diampu oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten setara Pejabat Eselon II. Pada tahun 2017, Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten hanya memperoleh predikat **C** dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018, nilai Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten meningkat menjadi **B**. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien selama periode tahun 2018.

Program yang mendukung capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten adalah Program Tata Kelola Pemerintahan dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tingkat kepuasan masyarakat diukur dalam hal pelayanan pengujian mutu barang/produk industri dan perdagangan yang dilaksanakan oleh UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten pada tahun 2018.

3.2.1.1 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) diukur dalam hal pelayanan pengujian barang industri dan perdagangan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri dan UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten selama tahun 2018.

Responden pada survey IKM adalah para pemohon pengujian yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang. Survey kepuasan masyarakat masih dilakukan secara manual dengan metode kuantitatif kemudian dianalisa dalam bentuk data dan grafik.

Pada tahun 2018, hasil survei IKM menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap seluruh pelayanan yang diberikan oleh UPTD Disperindag Banten mencapai 84.12% atau setara dengan nilai indeks 3.36 yang artinya sangat memuaskan. Aspek dengan penilaian tertinggi antara lain, keamanan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan dan kesopanan serta keramahan petugas UPTD Disperindag Banten sedangkan aspek yang perlu ditingkatkan lagi yaitu aspek prosedur pelayanan.

Tabel 3.2
Perhitungan Nilai IKM
Tahun 2018

No	Unsur Penilaian	Rata - rata Unsur Penilaian	Nilai Penimbang	Nilai IKM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Prosedur pelayanan	3.22	0.071	0.23
2	Persyaratan pelayanan	3.33	0.071	0.24
3	Kejelasan petugas pelayanan	3.33	0.071	0.24
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3.37	0.071	0.24
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3.33	0.071	0.24
6	Kemampuan petugas pelayanan	3.37	0.071	0.24
7	Kecepatan pelayanan	3.3	0.071	0.23
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.48	0.071	0.25
9	Kesopanan dan keramahan petugas	3.48	0.071	0.25
10	Keawajaran biaya pelayanan	3.41	0.071	0.24
11	Kepastian biaya pelayanan	3.41	0.071	0.24
12	Kepastian jadwal pelayanan	3.41	0.071	0.24
13	Kenyamanan lingkungan	3.39	0.071	0.24
14	Keamanan pelayanan	3.57	0.071	0.23
Total				3.36

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja pada Program Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Tersedianya 17 (tujuh belas) dokumen laporan keuangan;

- b) Tersedianya 3 (tiga) dokumen laporan pajak;
 - c) Tersedianya 2 (dua) dokumen Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) dan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP).
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Tersedianya 3 (tiga) dokumen laporan evaluasi program dan kegiatan;
 - b) Tersedianya 9 (sembilan) dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan;
 - c) Tersedianya 5 (lima) dokumen laporan evaluasi pengendalian;
 - d) Tersedianya 4 (empat) dokumen monitoring dan evaluasi;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 1 (satu) paket;
 - b) Terlaksananya pengadaan pembangunan gedung kantor sebanyak 1 (satu) paket;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya pemeliharaan inventaris kantor selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor selama 12 (dua belas) bulan.
5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya operasional tidak tetap dinas selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Terfasilitasinya penyediaan barang pakai habis selama 12 (dua belas) bulan;
 - d) Terfasilitasinya penyediaan bahan cetak selama 12 (dua belas) bulan;
 - e) Terfasilitasinya penyediaan makanan dan minuman kantor selama 12 (dua belas) bulan;
 - f) Terfasilitasinya penyediaan operasional jasa kantor selama 12 (dua belas) bulan;
 - g) Terlaksananya 1 (satu) kegiatan HUT Banten dan Banten EXPO;
 - h) Terfasilitasinya penyediaan BBM selama 12 (dua belas) bulan.
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan output sub kegiatan adalah terfasilitasinya pembinaan bagi 25 (dua puluh lima) orang pegawai;
7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 (dua belas) bulan.
8. Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan output sub kegiatan adalah tersedianya 1 (satu) paket alat pengujian pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri;
9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Terfasilitasinya pemeliharaan inventaris kantor UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan.
10. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Terfasilitasinya operasional kantor tidak tetap UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya penyediaan barang habis pakai UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Terfasilitasinya penyediaan Makan dan Minum UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - d) Terfasilitasinya penyediaan jasa telepon, listrik, internet dan PBHI/PBHN UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - e) Terfasilitasinya penyediaan BBM UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - f) Terfasilitasinya penyediaan bahan cetak UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan.
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dengan output sub kegiatan adalah Tersedianya 1 (satu) paket sarana dan prasarana kantor pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
12. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Terfasilitasinya penyediaan operasional tidak tetap UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya pengiriman kursus - kursus singkat/pelatihan UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Terfasilitasinya penyediaan barang pakai habis UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - d) Terfasilitasinya penyediaan makan dan minum kantor UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - e) Terfasilitasinya penyediaan operasional jasa kantor UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - f) Terfasilitasinya penyediaan BBM UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - g) Terfasilitasinya penyediaan bahan cetak UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan kantor UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya pemeliharaan Inventaris Kantor/APK UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Terfasilitasinya pemeliharaan dan rehabilitas gedung/kantor UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
14. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Tersedianya 2 (dua) dokumen profil kinerja program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
 - b) Tersedianya 1 (satu) dokumen visual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
 - c) Terfasilitasinya pengelolaan website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten selama 12 (dua belas) bulan;
 - d) Tersedianya 2 (dua) dokumen statistik sektoral dan informasi geospasial tematik;
 - e) Terfasilitasinya pengelolaan PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten selama 12 (dua belas) bulan.
15. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri selama 12 (dua belas) bulan.
16. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dengan output sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selama 12 (dua belas) bulan.

Program Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat Provinsi Banten. Fasilitasi kegiatan terhadap Bagian Sekretariat baik pada Unit Induk maupun UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri dan UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diupayakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku industri kecil menengah seperti, pengadaan alat pengujian mutu barang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengujian mutu barang bagi industri kecil menengah. Selain itu, Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat perihal kebutuhan informasi pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Banten serta dukungan terhadap pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan nilai 3.36 dan predikat "sangat memuaskan" merupakan parameter keberhasilan pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2018.

3.2.2 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERINDUSTRIAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian merupakan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang industri yang menunjukkan persentase perekonomian suatu daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan PDRB Banten didominasi oleh kontribusi sektor sekunder.

Sektor sekunder seringkali dikaitkan dengan perindustrian. Kegiatan utama yang dilakukan pada sektor industri adalah mengolah bahan mentah menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh sektor industri adalah meningkatkan nilai tambah dari suatu barang input. Sektor industri memiliki peranan yang penting di dalam perekonomian karena produktivitas yang dilakukan cukup tinggi sehingga mendorong permintaan tenaga kerja yang sangat tinggi. Selain perolehan upah lebih baik daripada sektor pertanian, juga karena adanya kesempatan untuk meningkatkan karir sehingga diharapkan dapat memperbaiki standar hidup untuk jangka panjang.

Menurut pihak Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten cenderung tumbuh dan berada diatas rata rata nasional. Dan hal ini ditandai dengan beberapa investasi baru yang terus bertambah. Sementara Industri bertambah maka semakin banyak produk yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan angka PDRB pada tahun - tahun berikutnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, perekonomian Banten menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku periode triwulan I - IV Tahun 2018 mencapai Rp.614.91 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 433.88 Triliun. Kontribusi terbesar pada struktur PDRB Banten adalah sektor industri yang mencapai Rp. 191.86 Triliun (atas dasar harga berlaku) dan Rp. 149.43 Triliun (atas dasar harga konstan 2010) pada periode Triwulan I - IV Tahun 2018.

Secara kumulatif (Triwulan I - IV 2018), laju pertumbuhan sektor industri pada struktur PDRB Banten adalah 3.8% jika dibandingkan dengan kumulatif Triwulan IV 2017.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah berhasil melampaui target kinerja LPE Sektor Perindustrian sebesar 3.7%.

$$LPE \text{ Sektor Industri Pengolahan} = \frac{(PDRB \text{ Tahun 2018} - PDRB \text{ Tahun 2017})}{PDRB \text{ Tahun 2017}} \times 100\%$$

$$LPE \text{ Sektor Industri Pengolahan} = \frac{(149.43 - 144.22)}{144.22} \times 100\% = 3.61\%$$

Berdasarkan data Industri Besar Sedang (IBS), terdapat beberapa industri utama Provinsi Banten yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan IV 2018. Beberapa subkategori industri yang mengalami pertumbuhan tinggi antara lain kimia, makanan, dan logam dasar sedangkan industri yang mengalami pertumbuhan negatif antara lain industri alas kaki dan industri elektronik. Dari golongan industri mikro dan

kecil (IMK), industri kertas dan pakaian jadi tercatat tumbuh meningkat pada triwulan IV 2018.

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian tidak terlepas dari kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten serta didukung oleh para pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya saing industri di Provinsi Banten. Program prioritas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya mendorong capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perindustrian Tahun 2018 adalah Program Peningkatan Daya Saing Industri dan Program Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Standarisasi Industri.

3.2.2.1 PERSENTASE STRUKTUR INDUSTRI PADA INDUSTRI UNGGULAN DAERAH YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGUATAN

Perhitungan persentase struktur industri pada industri unggulan daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan menggunakan metode survey atau data sekunder yang menunjukkan persentase struktur industri di suatu daerah dan mengidentifikasi industri unggulan yang telah mendapatkan kebijakan. Rumus yang digunakan untuk menghitung industri unggulan yang telah difasilitasi adalah:

$$\text{Industri unggulan yang difasilitasi} = \frac{\sum \text{industri unggulan yang telah difasilitasi}}{\sum \text{industri unggulan}} \times 100\%$$

Provinsi Banten memiliki 10 (sepuluh) industri unggulan, pada tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pembinaan terhadap 3 (tiga) industri unggulan. Berdasarkan data tersebut, maka persentase struktur industri pada industri unggulan daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan adalah:

$$\text{Industri unggulan yang difasilitasi} = \frac{3}{10} \times 100\% = 30\%$$

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah berhasil melampaui target persentase struktur industri pada industri unggulan daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan yakni 30% atau capaian 150%.

Capaian indikator persentase struktur industri pada industri unggulan daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahkan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan dengan capaian kinerja output sebagai berikut:

- a) Tersedianya 2 (dua) dokumen pengembangan sentra IKM;
- b) Tersedianya 2 (dua) dokumen Kajian Pengembangan Kawasan/Sentra Industri;
- c) Tersedianya 1 (satu) dokumen pengembangan sistem informasi industri;

- d) Tersedianya 5 (lima) dokumen peningkatan kerjasama penelitianan IPTEK industri;
- e) Terfasilitasinya perizinan dan regulasi industri sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan;
- f) Tersedianya 1 (satu) dokumen kajian galeri industri (industri kreatif);
- g) Tersedianya 1 (satu) dokumen kajian pemanfaatan lahan industri.

Selain itu, indikator Capaian indikator persentase struktur industri pada industri unggulan daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan didukung pula dengan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri dengan capaian kinerja output sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Terfasilitasinya pengawasan produk industri SNI wajib bagi 50 (lima puluh) produk & industri di Provinsi Banten;
- b) Terfasilitasinya 40 (empat puluh) industri dalam upaya edukasi dan pembinaan bagi industri menuju SNI wajib.

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahkan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan memberikan dorongan terhadap peningkatan LPE Sektor Perindustrian karena fasilitasi penguatan struktur industri yang diberikan kepada industri unggulan daerah telah memberikan dampak pertumbuhan yang cukup signifikan pada Triwulan IV Tahun 2018. Selain itu, pelayanan rekomendasi teknis perijinan industri juga memberikan peluang pertumbuhan industri pada tahun berikutnya.

Peningkatan LPE Sektor Perindustrian juga dipengaruhi oleh produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan industri. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri merupakan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam melakukan kontrol atas barang yang diproduksi oleh industri (sisi hulu). Pada jangkauan yang lebih luas, produk ber-SNI dapat membuka pasar ekpor bagi produk lokal indonesia khususnya produk dari wilayah banten.

3.2. 2.2 RASIO PERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF

Rasio pertumbuhan industri kreatif yaitu membandingkan angka–angka pertumbuhan dalam persentase pada bidang industri yang mengandalkan bakat kreatifitas sebagai modal utama antara lain industri fashion, animasi dan kerajinan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan industri kreatif adalah:

$$RPIK = \frac{\text{Target Tahun Berjalan}}{\text{Target 5 Tahun}} \times 100\%$$

Pada periode tahun 2017 - 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menetapkan 1050 (seribu lima puluh) industri kreatif yang akan memperoleh pembinaan dan pengembangan usaha industri. Pada tahun 2018, industri kreatif yang telah dibina dan dikembangkan mencapai 210 (dua ratus sepuluh) industri sehingga dapat dihitung rasio pertumbuhan industri kreatif di Provinsi Banten sebagai berikut:

$$RPIK = \frac{210}{1050} \times 100\% = 20\%$$

Dalam upaya mendukung capaian indikator rasio pertumbuhan industri kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri dengan capaian kinerja output sebagai berikut:

- 1) Terfasilitasinya pengembangan 2 (dua) sentra IKM;
- 2) Terfasilitasinya 175 (seratus tujuh puluh lima) orang dalam rangka pengembangan mutu produk dan SDM IKM;
- 3) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan seleksi produk unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota;
- 4) Terfasilitasinya 40 (empat puluh) IKM dalam Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten.

3.2.2.3 PERSENTASE KERJASAMA SDM BERKOMPETENSI INDUSTRI YANG AKTIF

Persentase kerjasama SDM berkompetensi industri yang aktif yaitu penjelasan mengenai tenaga kerja yang memiliki keahlian bidang industri atau menempuh pendidikan bidang pengolahan dan telah diterima di perusahaan yang bergerak di sektor industri. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kerjasama SDM berkompetensi industri yang aktif adalah:

$$PKSDMI = \frac{\text{Target Tahun Berjalan}}{\text{Target 5 Tahun}} \times 100\%$$

Pada periode tahun 2017 - 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menetapkan 450 (empat ratus lima puluh) kerjasama dengan industri dan SMK di Provinsi Banten mengenai penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi bidang industri. Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah menyepakati 108 MOU dengan industri di Provinsi Banten sehingga dapat dihitung persentase kerjasama SDM berkompetensi industri yang aktif adalah:

$$PKSDMI = \frac{108}{450} \times 100\% = 24\%$$

Dalam upaya mendukung capaian indikator persentase kerjasama SDM berkompetensi industri yang aktif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dengan capaian kinerja output sebagai berikut:

- 1) Terfasilitasinya 1 (satu) kegiatan pengembangan industri kreatif;
- 2) Terfasilitasinya peningkatan nilai tambah bagi 20 (dua puluh) produk IKM;
- 3) Tersedianya 1 (satu) dokumen Kajian Standar Kompetensi Industri;
- 4) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan pengembangan pemasaran dan kemitraan untuk sumber daya lokal;
- 5) Terfasilitasinya 1 (satu) kegiatan pengembangan hilirisasi IKM terhadap industri besar;
- 6) Terbentuknya kerjasama link and match antara 18 (delapan belas) industri dan SMK.

3.2.2.4 JUMLAH PRODUK INDUSTRI KECIL BERSTANDAR DAN BERSERTIFIKASI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah menetapkan target 200 (dua ratus) produk industri kecil berstandar dan bersertifikasi pada tahun 2018. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam mencapai target tersebut adalah fasilitasi sertifikasi halal, uji umur simpan (kadaluarsa), ijin pangan-industri rumah tangga (P-IRT) dan desain kemasan secara gratis kepada industri kecil menengah (IKM) di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Tabel 3.3
IKM yang mendapatkan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi
Tahun 2018

No.	Jenis Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah Produk
1.	Desain Kemasan	124
2.	Desain Kemasan dan Kemasan/Label/Stiker	160
3.	Sertifikasi Halal	25
4.	Uji Umur Simpan (Kadaluarsa)	25
5.	Ijin Pangan-Industri Rumah Tangga (P-IRT)	25
	Jumlah Produk Industri Kecil yang Berstandar dan bersertifikasi	359

Dalam upaya mendukung capaian indikator jumlah produk industri kecil berstandar dan bersertifikasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pengembangan dan Peningkatan Produk industri, dengan capaian output sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya pelayanan rumah kemasan bagi 200 (dua ratus) produk IKM;
 - b) Tersedianya 1 (satu) paket peralatan dan mobil kemasan.
2. Standarisasi dan Sertifikasi Industri, dengan capaian output sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya pelayanan standarisasi dan sertifikasi uji mutu bagi 50 (lima puluh) produk industri bahan bangunan;
 - b) Terfasilitasinya pelayanan standarisasi dan sertifikasi uji mutu bagi 50 (lima puluh) produk industri pangan;
 - c) Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hki, uji umur simpan, P-IRT dan halal bagi 80 (delapan puluh) produk IKM.

3.2.3 TINGKAT INFLASI BAHAN POKOK DAN BAHAN PENTING

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri atau daerah meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten merilis data laju inflasi di Provinsi Banten Desember 2018 terhadap Desember 2017 adalah 3.42% sedangkan laju inflasi bahan pokok dan bahan penting adalah 2.47%. Hal ini disebabkan harga beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan pada Bulan Desember tahun 2018.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam upaya mengendalikan Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting adalah Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

3.2.3.1 KOEFISIEN VARIASI HARGA KEBUTUHAN POKOK ANTAR WAKTU

Koefisien variasi harga kebutuhan pokok secara runtun waktu menggambarkan fluktuasi (simpangan terhadap rata-rata) yang digunakan untuk mengetahui stabilitas harga suatu komoditas. Semakin kecil nilai koefisien variasi dapat diinterpretasikan bahwa harga relatif stabil atau memiliki fluktuasi yang rendah (Rachman, 2005). Harga di suatu kota/provinsi dikatakan stabil apabila nilai koefisien variasi harganya berada pada kisaran 5-9% (Kemendag, 2010). Jika nilai koefisien variasi lebih dari 9% mengindikasikan harga berfluktuasi tinggi dan tidak stabil.

Sistem Informasi Harga Bahan Pokok (SIHBP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menunjukkan bahan kebutuhan pokok tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim selama tahun 2018. Disparitas paling tinggi terdapat pada komoditi cabe merah dengan selisih Rp. 16,000,- antara harga tertinggi (Bulan Januari) dengan harga terendah (Bulan Desember) pada tahun 2018.

Tabel 3.4
Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Provinsi Banten
Januari - Desember Tahun 2018

No.	Komoditi	Disparitas Harga Antar Waktu (Rp.)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
1	Bawang Merah	18,000	24,200	24,200	31,000	33,500	33,500	26,600	22,200	22,200	21,350	26,600	29,300
2	Bawang Putih	19,600	29,800	29,800	27,800	24,250	24,250	29,600	24,400	24,400	22,700	22,400	19,500
3	Beras IR KW II	11,500	11,800	11,800	9,700	9,950	9,950	9,800	9,800	9,800	9,900	10,100	10,000
4	Cabe Merah	41,200	38,800	38,800	42,500	32,500	32,500	31,400	25,600	25,600	39,500	28,100	32,800
5	Ayam Broiler	35,000	33,400	33,400	35,500	38,250	38,250	38,800	36,200	36,200	34,200	35,500	37,800
6	Daging Sapi	120,000	116,000	116,000	116,000	117,500	117,500	118,000	114,000	114,000	115,700	118,000	116,000
7	Garam	1,800	1,800	1,800	2,100	1,800	1,800	1,800	2,000	2,000	1,800	2,200	2,000
8	Gula Pasir	12,500	12,400	12,400	12,250	12,000	12,000	11,900	11,800	11,800	11,900	11,900	11,800
9	Jagung Pipilan	8,000	8,600	8,600	8,800	9,000	9,000	9,300	9,000	9,000	9,500	10,000	10,000
10	Kedelai	10,000	9,500	9,500	9,750	9,600	9,600	9,700	9,700	9,700	11,200	9,600	9,600
11	Minyak Goreng	10,900	10,700	10,700	11,100	10,750	10,750	10,700	10,200	10,200	10,350	10,000	9,500
12	Susu	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
13	Telur Ayam	22,000	23,200	23,200	23,900	25,000	25,000	25,000	23,200	23,200	21,200	23,800	26,500

Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menargetkan koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu tidak melebihi 5%. Hingga bulan Desember 2018, realisasi koefisien variasi harga antar waktu di Provinsi Banten adalah 1.65% yang artinya berada pada standar terbaik koefisien variasi yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok di Provinsi Banten relatif stabil dan terkendali selama tahun 2018.

Tabel 3.5
Koefisien Variasi Harga Antar Waktu
Bahan Kebutuhan Pokok di Provinsi Banten

No.	Komoditi	Standar Deviasi	Mean	Koefisien Variasi
1	Bawang Merah	4,954.86	26,054.17	19.02
2	Bawang Putih	3,670.49	24,875.00	0.15
3	Beras IR KW II	829.25	10,341.67	0.08
4	Cabe Merah	5,946.04	34,108.33	0.17
5	Ayam Broiler	1,895.55	36,041.67	0.05
6	Daging Sapi	1,728.09	116,558.33	0.01
7	Garam	144.34	1,908.33	0.08
8	Gula Pasir	260.64	12,054.17	0.02
9	Jagung Pipilan	575.77	9,066.67	0.06
10	Kedelai	464.23	9,787.50	0.05
11	Minyak Goreng	448.80	10,487.50	0.04
12	Susu	-	42,000.00	0.00
13	Telur Ayam	1,447.46	23,766.67	0.06
Jumlah Koefisien Variasi				19.80
Koefisien Variasi Rata - rata				1.65

Dalam upaya mendukung capaian indikator koefisien variasi harga kebutuhan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:

- a) Terfasilitasinya 4 (empat) kegiatan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada tahun 2018;
- b) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan *Capacity Building* TPID Provinsi Banten;
- c) Terfasilitasinya 1 (satu) kegiatan rapat sinkronisasi program dan kegiatan tahun 2018;
- d) Terfasilitasinya evaluasi pengendalian inflasi daerah selama 12 (dua belas) bulan.

3.2.3.2 CAPAIAN STABILITAS HARGA BARANG POKOK

Jika diukur berdasarkan hasil perhitungan koefisien variasi yang menunjukkan nilai 1.65% maka harga bahan kebutuhan pokok di Provinsi Banten relatif stabil selama tahun 2018. Walaupun Badan Pusat Statistik Provinsi Banten merilis data bahwa 176 komoditas mengalami kenaikan harga dan 59 komoditas mengalami

penurunan harga pada bulan Desember 2018 (BRS, 2 Januari 2019) namun perubahan harga masih dalam batas kewajaran (koefisien variasi Tahun 2018 < 5%).

Apabila capaian stabilitas harga dihitung berdasarkan harga rata-rata seluruh barang pokok pada tahun 2018 maka angka yang dihasilkan adalah 1.22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga barang pokok di Provinsi Banten tidak lebih dari 5% selama tahun 2018.

Tabel 3.6
Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok
Tahun 2018

No.	Komoditi	Harga Komoditi pada Tahun (Rp.)	
		2017	2018
1	Bawang Merah	18,000	29,300
2	Bawang Putih	19,600	19,500
3	Beras IR KW II	11,500	10,000
4	Cabe Merah	41,200	32,800
5	Ayam Broiler	35,000	37,800
6	Daging Sapi	120,000	116,000
7	Garam	1,800	2,000
8	Gula Pasir	12,500	11,800
9	Jagung Pipilan	8,000	10,000
10	Kedelai	10,000	9,600
11	Minyak Goreng	10,900	9,500
12	Susu	42,000	42,000
13	Telur Ayam	22,000	26,500
	Total Harga (Rp.)	352,500	356,800
	Capaian Stabilitas Harga (%)	1.22	

Dalam upaya mendukung capaian indikator koefisien variasi harga kebutuhan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan Kegiatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:

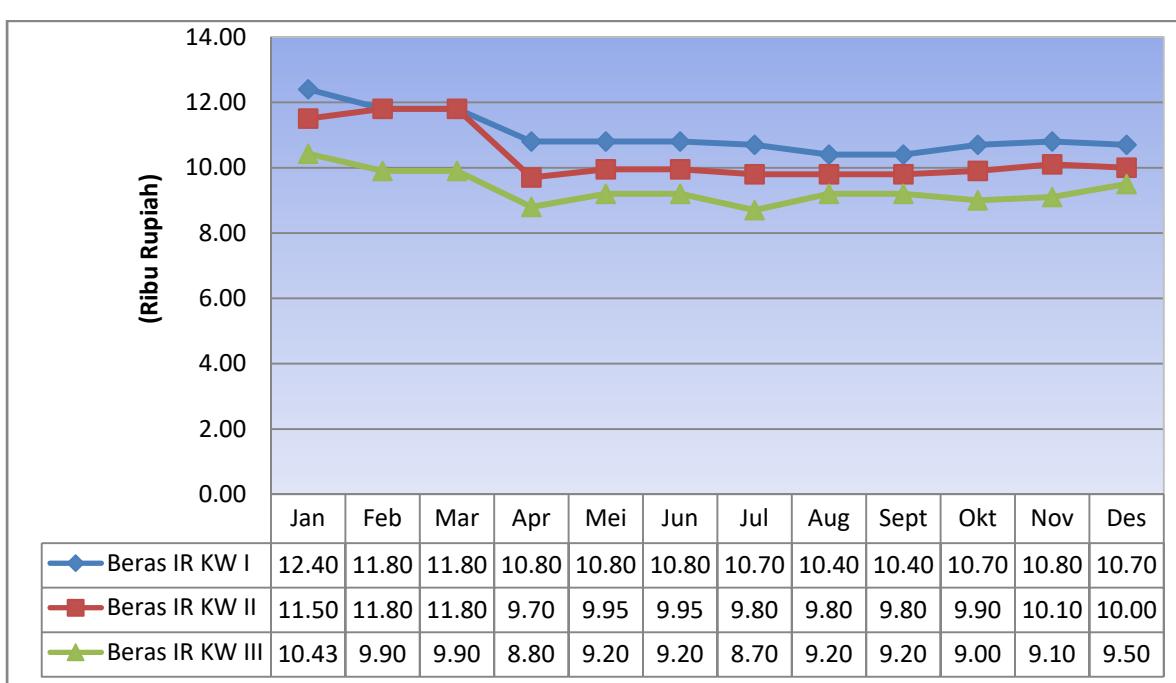
- a) Terfasilitasinya 9 (sembilan) kegiatan bazar/gelar pasar murah;
- b) Terfasilitasinya 3 (tiga) kegiatan pemantauan harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting;
- c) Terfasilitasinya 3 (tiga) kegiatan sistem informasi harga bahan pokok strategis di Provinsi Banten;

- d) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan rapat pendataan stok indikatif kebutuhan pokok masyarakat;
- e) Terfasilitasnya 1 (satu) kegiatan forum komunikasi perpupukan di Provinsi Banten (data dan informasi pupuk bersubsidi).

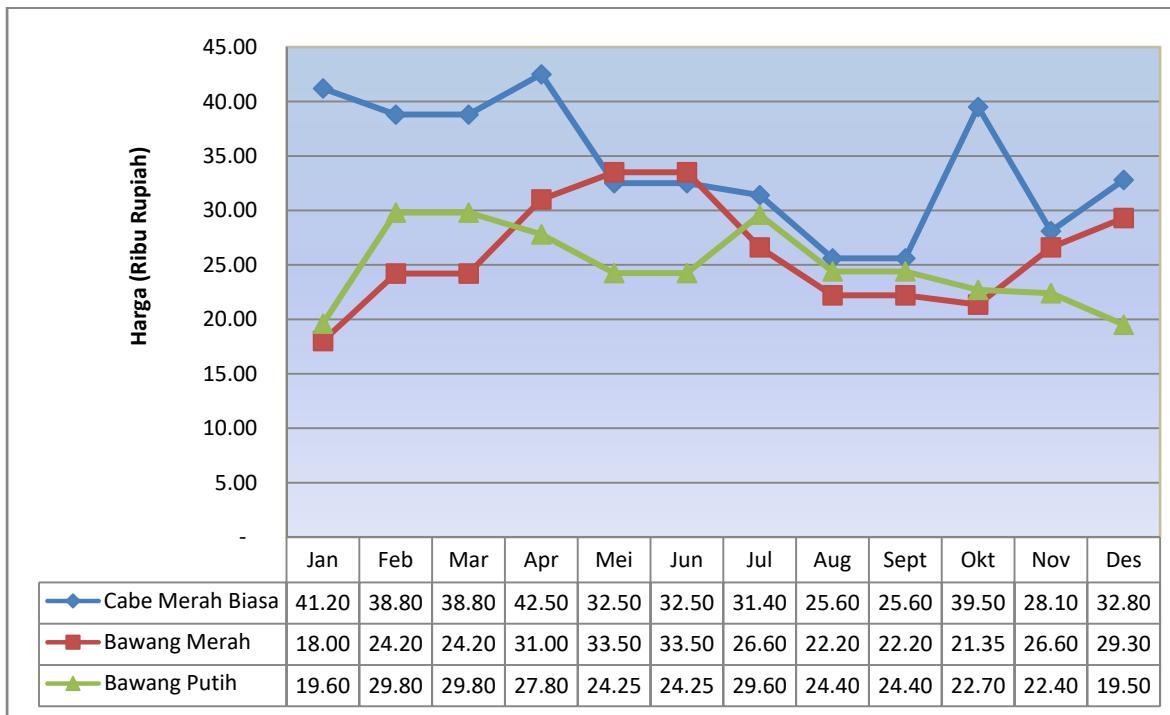
Gambar 3.1
Grafik Harga Rata - rata Telur, Daging Ayam dan Daging Sapi
Periode Januari - Desember 2018



Gambar 3.2
Grafik Harga Rata - rata Beras Periode Januari - Desember 2018



Gambar 3.3
Grafik Harga Rata - rata Cabe dan Bawang
Periode Januari - Desember 2018



3.2.4 LPE SEKTOR PERDAGANGAN

Selain sektor industri, struktur PDRB Banten juga banyak didukung oleh pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor perdagangan sangat erat kaitannya dengan jasa dan lapangan usaha di bidang jasa yang selalu bertambah dan mengalami perkembangan setiap tahunnya. Perkembangan tersebut membuat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Banten semakin bertambah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, perekonomian Banten menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku periode triwulan I - IV Tahun 2018 mencapai Rp. 614.91 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 433.88 Triliun. Kontribusi terbesar kedua pada struktur PDRB Banten adalah sektor perdagangan yang mencapai Rp. 76.82 Triliun (atas dasar harga berlaku) dan Rp. 58.61 Triliun (atas dasar harga konstan 2010) pada periode Triwulan I - IV Tahun 2018.

Secara kumulatif (Triwulan I - IV 2018), laju pertumbuhan sektor perdagangan pada struktur PDRB Banten adalah 7.25% jika dibandingkan dengan kumulatif Triwulan IV 2017.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah berhasil melampaui target kinerja LPE Sektor Perdagangan sebesar 4.9%.

$$LPE \text{ Sektor Perdagangan} = \frac{(PDRB \text{ Tahun 2018} - PDRB \text{ Tahun 2017})}{PDRB \text{ Tahun 2017}} \times 100\%$$

$$LPE \text{ Sektor Perdagangan} = \frac{(58.61 - 54.65)}{54.65} \times 100\% = 7.25\%$$

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam mendukung capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perdagangan antara lain:

- 1) Program Perdagangan Dalam Negeri;
- 2) Program Perdagangan Luar Negeri;
- 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri;
- 4) Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

Pelaksanaan program-program tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan LPE Sektor Perdagangan Tahun 2018 karena masing-masing program berorientasi pada peningkatan indikator yang merupakan bagian dari parameter tumbuhnya sektor perdagangan dalam struktur PDRB Provinsi Banten. Indikator tersebut diantaranya adalah pertumbuhan omset pedagang, neraca ketersediaan bahan pokok, surplus neraca perdagangan (pengembangan ekspor dan pengendalian impor) dan indeks tendensi konsumen (ITK).

3.2.4.1 PERTUMBUHAN OMSET PEDAGANG

Salah satu indikator yang mendukung capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perdagangan adalah pertumbuhan omset pedagang. Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menetapkan target omset pedagang akan tumbuh 10% jika dibandingkan tahun 2017. Pedagang yang dimaksud pada indikator tersebut adalah pedagang - pedagang yang menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten pada tahun 2018. Pertumbuhan omset pedagang tahun 2018 ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 3.7

Pertumbuhan Omset Pedagang

(Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten)

Tahun 2018

No	Pedagang (Komoditi Dagang)	Nilai Omset (Juta Rupiah)		Pertumbuhan Omset (%)
		Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Beras	420	420	0.00
2	Sayuran	300	180	-40.00

No	Pedagang (Komoditi Dagang)	Nilai Omset (Juta Rupiah)		Pertumbuhan Omset
3	Gula semut	150	300	100.00
4	Sirup belimbing	250	324	29.60
5	Laer jahe	300	500	66.67
6	Golok	100	150	50.00
7	Batik Krakataoa	100	100	0.00
8	Gula semut kelapa	93	96	3.23
9	Jam kayu	50	50	0.00
10	Keripik tempe sagu	175	180	2.86
Pertumbuhan Omset Rata - rata Tahun 2018				21.23

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pedagang beras, batik krakatoa dan jam kayu tidak mengalami penurunan dan kenaikan omset sedangkan pedagang gula semut mengalami kenaikan omset mencapai 100% pada tahun 2018. Pertumbuhan omset pedagang gula semut merupakan salah satu gejala positif atas perkembangan nilai jual produk unggulan berbasis sumber daya lokal.

Dalam upaya mendukung capaian indikator pertumbuhan omset pedagang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:

- a) Terfasilitasinya 3 (tiga) kegiatan pembinaan aparatur dan pelaku usaha perdagangan berjangka;
- b) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan peningkatan pengelolaan sistem resi gudang dan pembinaan;
- c) Tersedianya 1 (satu) dokumen kerjasama UKM dan pengusaha ritel;
- d) Terbinanya 5 (lima) pelaku usaha melalui misi dagang lokal;
- e) Terbinanya 10 (sepuluh) pelaku usaha melalui partisipasi fasilitasi pameran nasional;
- f) Terbinanya 10 (sepuluh) pelaku usaha melalui penyelenggaraan dan partisipasi pasar lelang.

3.2.4.2 NERACA KETERSEDIAAN BARANG POKOK

Berdasarkan hasil perhitungan prognosa kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan pokok yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Provinsi Banten diperkirakan mengalami surplus beras sebesar 35,293 ton, surplus

jagung sebesar 60.261 ton, surplus kacang tanah sebesar 662 ton dan surplus daging ayam sebesar 137.130 ton pada tahun 2018.

Komoditas pangan yang diperkirakan defisit adalah kedelai sebesar 115,285 ton, bawang merah sebesar 24,809 ton, cabe merah sebesar 20,453 ton, kebutuhan gula pasir sebesar 78,803 ton, kebutuhan minyak goreng sebesar 130,704 ton, daging sapi sebesar 10,409 ton dan telur ayam sebesar 33,312 ton.

Pemenuhan pangan pokok strategis tidak seluruhnya diproduksi di Provinsi Banten seperti bawang merah, cabe merah, minyak goreng, gula pasir, kedelai, daging sapi dan telur ayam tetapi didatangkan dari luar Provinsi Banten.

Tabel 3.8
Prognosa Ketersediaan Bahan Pokok Tahun 2018
di Provinsi Banten

No.	Komoditas Pangan	Perkiraan Produksi (Ton)	Perkiraan Ketersediaan (Ton)	Perkiraan Kebeutuhan (Ton)	Perkiraan Surplus/Defisit (Ton)
1.	Beras	2,413,691	1,357,056	1,321,763	35,293
2.	Jagung	132,451	66,226	5,964	60,261
3.	Kacang Tanah	5,167	4,469	3,807	662
4.	Kedelai	10,825	8,948	124,233	(115,285)
5.	Cabe Merah	6,455	6,069	26,522	(20,452)
6.	Bawang Merah	576	527	30,075	(29,548)
7.	Gula Pasir	-	-	78,803	(78,803)
8.	Daging Sapi	27,647	26,265	36,673	(10,409)
9.	Daging Ayam	280,061	266,057	128,928	137,130
10.	Telur Ayam	71,395	67,825	101,137	(33,312)
11.	Minyak Goreng	-		130,704	130,704

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2018

Dalam upaya mendukung capaian indikator neraca ketersediaan bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:

- a) Tersedianya 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Banten;
- b) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan rapat koordinasi pendataan sarana perdagangan;
- c) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan rapat koordinasi distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting;

- d) Terfasilitasinya 1 (satu) kegiatan rapat koordinasi bidang perdagangan dalam negeri;
- e) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan bimtek UKM/pedagang pasar di Provinsi Banten;
- f) Terfasilitasinya 2 (dua) kegiatan bimtek pengelolaan pasar bagi pengelola pasar.

3.2.4.3 SURPLUS NERACA PERDAGANGAN

Secara kumulatif, nilai ekspor Provinsi Banten periode Januari - Desember 2018 mencapai US\$11,900.50 Juta atau meningkat 5.89 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor disebabkan oleh ekspor nonmigas yang meningkat 5.6 persen dan meningkatnya ekspor barang migas yang cukup signifikan.

Tabel 3.9
Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Banten
Tahun 2017 dan 2018

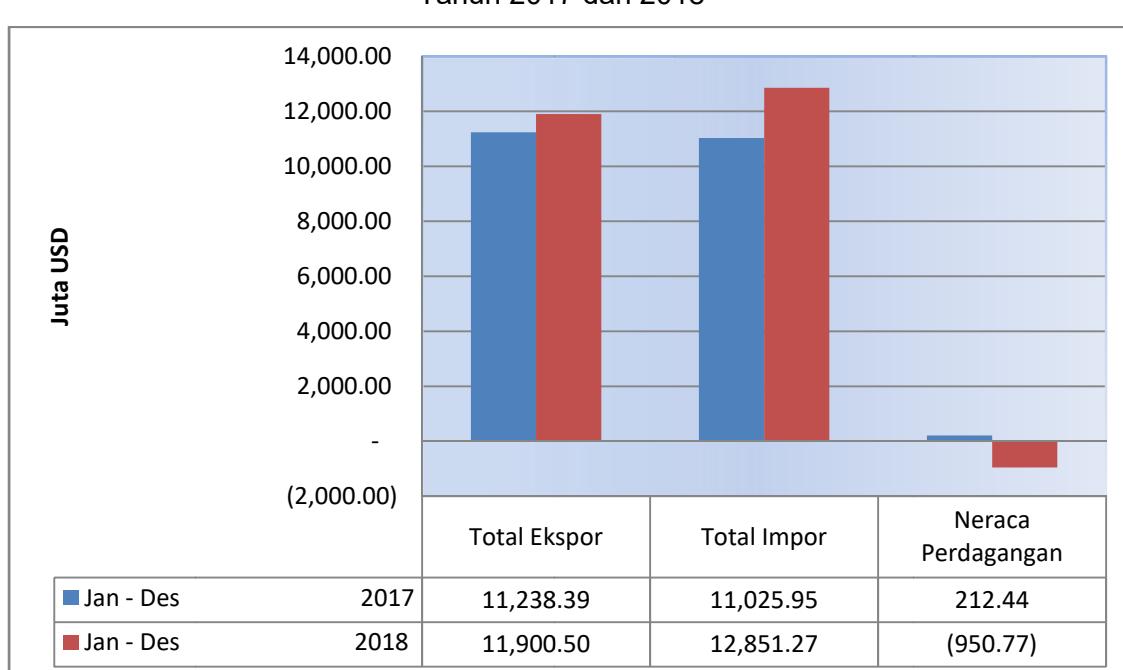
URAIAN	Nilai FOB (Juta USD)	
	Tahun 2017	Tahun 2018
Total Ekspor	11,238.39	11,900.50
Migas	24.75	57.93
- Minyak Mentah	-	-
- Hasil Minyak	3.45	5.64
- Gas	21.30	52.29
Non Migas	11,213.64	11,842.57
- Pertanian	233.56	251.71
- Industri	10,977.58	11,571.82
- Tambang & Lainnya	2.50	19.04
Total Impor	11,025.95	12,851.27
Migas	3,304.80	3,934.91
- Minyak Mentah	-	-
- Hasil Minyak	3,304.80	3,908.74
- Gas	-	26.17
Non Migas	7,721.15	8,916.36
Neraca Perdagangan	212.44	(950.77)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Februari, 2019

Dalam upaya mendukung capaian indikator surplus neraca perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan - kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:
 - a) Tersedianya 1 (satu) dokumen identifikasi produk ekspor Provinsi Banten;
 - b) Terfasilitasinya pengembangan 4 (empat) produk ekspor;
 - c) Tersedianya 1 (satu) dokumen analisa produk ekspor Provinsi Banten di negara pesaing;
 - d) Terfasilitasinya bimbingan teknis bagi 5 (lima) produk IKM dalam upaya peningkatan ekspor;
 - e) Terfasilitasinya 1 (satu) paket penyediaan dan penyebarluasan informasi produk potensial daerah dan informasi pasar luar negeri;
2. Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya 5 (lima) kegiatan pengendalian impor daerah;
 - b) Terfasilitasinya monitoring dan pelaporan importir di Provinsi Banten selama 12 (dua belas) bulan.
3. Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya 1 (satu) kegiatan peningkatan promosi dagang produk pada Pameran Dagang Nasional;
 - b) Terbinanya 18 (delapan belas) pelaku usaha melalui peningkatan promosi dagang produk pada Pameran Dagang Internasional;
 - c) Terfasilitasinya 1 (satu) kegiatan misi dagang produk ekspor.

Gambar 3.4
Grafik Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2017 dan 2018



Gambar 3.4 menggambarkan bahwa ekspor Provinsi Banten tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar US\$662.11 Juta jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kenaikan nilai ekspor tahun 2018 diikuti pula dengan kenaikan nilai impor sebesar US\$1825.32 Juta jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kenaikan nilai impor yang sangat tinggi pada tahun 2018 mengakibatkan Provinsi Banten mengalami defisit mencapai US\$950.77 Juta.

Defisit neraca perdagangan Provinsi Banten menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum mampu mencapai target surplus neraca perdagangan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten ditargetkan mencapai surplus neraca perdagangan sebesar US\$2970.27 Juta.

Tabel 3.10
Rincian Ekspor Non Migas
Provinsi Banten
(Januari - Desember 2017 dan Januari - Desember 2018)

No	Uraian	Jan - Des 2017	Jan - Des 2018
1	Alas Kaki	2641.39	2534.55
2	Bahan Kimia Organik	1082.03	995.1
3	Plastik dan Barang Plastik	909.12	992.72
4	Besi dan Baja	672.54	820.34
5	Mesin-mesin/Pesat Mekanik	480.8	526.19
6	Berbagai Makanan Olahan	480.74	552.26
7	Mesin/Peralatan Listrik	425.48	486.42
8	Karet dan Barang dari Karet	477.21	482.46
9	Tembaga	438.19	410.78
10	Kertas/Karton	345.13	397.87
	Total	7952.63	8198.69
	Lainnya	3261.01	3643.87
	Total Ekspor Non Migas	11213.64	11842.56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Februari, 2019

Ekspor nonmigas sepuluh golongan barang utama untuk Januari - Desember 2018 memberikan kontribusi 69.23 persen terhadap total ekspor nonmigas. Nilai ekspor nonmigas untuk sepuluh golongan barang utama tersebut naik 3,09 persen atau sebesar US\$246.06 juta dibanding ekspor nonmigas pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ekspor tertinggi berasal dari besi dan baja yang naik

US\$147.8 Juta dan terendah terjadi pada golongan karet dan barang dari karet dengan kenaikan sebesar US\$5.25 Juta.

Sebaliknya, penurunan ekspor tertinggi terjadi pada golongan alas kaki sebesar US\$106.84 Juta dan penurunan ekspor terendah adalah tembaga dengan nilai penurunan US\$27.4 Juta.

3.2.4.4 INDEKS TENDENSI KONSUMEN

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan oleh BPS melalui Survei Tendensi Konsumen (STK).

ITK merupakan indeks yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Banten pada Triwulan IV-2018 adalah 111.35 yang artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat atau lebih baik dari triwulan sebelumnya. Variabel yang mempengaruhi indeks tendensi konsumen (ITK) di Provinsi Banten pada Triwulan IV 2018 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Banten
Triwulan III dan IV 2018

No.	Variabel Pembentuk	Triwulan III 2018	Triwulan IV 2018
1.	Pendapatan rumah tangga kini	111.71	111.54
2.	Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	104.43	106.65
3.	Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan dan rekreasi)	106.26	116.85
Indeks Tendensi Konsumen (ITK)		108.55	111.35

Sumber: BPS Provinsi Banten, Februari, 2019

Berdasarkan tabel 4.6, variabel yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap ITK adalah tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan dan bukan makanan dengan nilai indeks 116.85. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten merilis bahwa meningkatnya konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan dan bukan makanan dipengaruhi oleh naiknya pendapatan rumah tangga, faktor musiman seperti Maulud Nabi Muhammad SAW pada bulan November 2018, liburan sekolah serta Hari Natal dan Tahun Baru.

Variabel terbesar kedua yang mempengaruhi ITK adalah meningkatnya pendapatan rumah tangga dengan nilai indeks 111.54. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh adanya kenaikan gaji/penghasilan usaha serta tambahan upah/bonus.

Selain kedua variabel tersebut, kenaikan harga barang dan jasa yang cukup rendah pada Triwulan IV-2018 (laju inflasi 1.03%) sehingga kurang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi di Provinsi Banten. Laju inflasi kurang mempengaruhi ITK karena kenaikan harga barang dan jasa pada Triwulan IV 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh tarikan permintaan. Kondisi tersebut terlihat dari naiknya harga komoditas makanan jadi dan komoditas sandang setiap bulan selama Triwulan IV 2018 serta turunnya harga komoditas bahan makanan pada Oktober 2018 (BPS Provinsi Banten-BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Oktober s.d Desember, 2018).

Dalam upaya mendukung capaian indikator indeks tendensi konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Perlindungan Konsumen, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya 1 (satu) paket edukasi perlindungan konsumen;
 - b) Terfasilitasinya optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selama 12 (dua belas) bulan;
2. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga, dengan capaian kinerja output sebagai berikut:
 - a) Terfasilitasinya pengawasan barang beredar/jasa dan tertib niaga selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Terfasilitasinya pengawasan tim terpadu penanggulangan dan pengendalian bahan berbahaya (B2) selama 12 (dua belas) bulan.

Kegiatan Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar memberikan jaminan kepastian dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Kegiatan - kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap peredaran barang beredar di pasar sehingga mempengaruhi peningkatan Indeks Tendensi Konsumen.

3.2.4.5 PERSENTASE PELAYANAN SERTIFIKASI DAN STANDARISASI

Pelayanan sertifikasi dan standarisasi merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Sejak tahun 2017, UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang telah bersiap untuk memberikan pelayanan sertifikasi dan

standarisasi mutu barang terhadap masyarakat industri di Provinsi Banten. Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima, UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang telah menetapkan target pada periode tahun 2017 - 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Percentase Pelayanan Sertifikasi dan Mutu Barang
Tahun 2017 - 2022

No.	Target Tahun 2017 - 2022	Kondisi Awal	Target Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketersediaan laboratorium tekanan, massa, temperatur, panjang dan volume	√	√	√	√	√	√
2.	Ketersediaan alat dan bahan uji pada laboratorium tekanan, massa, temperatur, panjang dan volume	√	√	√	√	√	√
3.	Ketersediaan laboratorium pengujian mutu barang		√	√	√	√	√
4.	Ketersediaan alat dan bahan uji pada laboratorium pengujian mutu barang			√	√	√	√
5.	Akreditasi laboratorium tekanan, massa, temperatur, panjang dan volume		√	√	√	√	√
6.	Akreditasi laboratorium pengujian mutu barang			√	√	√	√
7.	Ketersediaan tenaga fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)			√	√	√	√
Presentase Pelayanan Sertifikasi dan Mutu Barang		75%	80%	85%	90%	95%	100%

Pada tahun 2018, UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang telah melakukan capaian - capaian sebagai berikut:

1. Pengembangan ketersediaan laboratorium tekanan, massa, temperatur, panjang dan volume;
2. Ketersediaan alat dan bahan uji pada laboratorium tekanan, massa temperatur, panjang dan volume;
3. Melakukan proses akreditasi laboratorium tekanan, massa, temperatur, panjang dan volume.

Berdasarkan capaian - capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase pelayanan sertifikasi dan mutu barang telah mencapai target 80% pada tahun 2018.

Dalam upaya mendukung capaian indikator persentase pelayanan sertifikasi dan standarisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Mutu Barang, dengan capaian kinerja ouput adalah terfasilitasinya pelayanaan pengujian mutu barang selama 12 (dua belas) bulan.
2. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi, dengan capaian kinerja ouput adalah terfasilitasinya pelayanaan kalibrasi dan sertifikasi selama 12 (dua belas) bulan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai dengan DPPA Tahun 2018, pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten adalah Rp. 106,179,880,000,- dengan jumlah realisasi Rp. 35,638,008,095,- atau setara dengan 33.56%. Realisasi belanja yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Belanja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2018

No.	Sumber Anggaran	Realisasi			
		2017		2018	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Total Realisasi	32,519,940,238	94.39	35,638,008,095	33.56
1.1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	14,375,322,109	98.31	15,205,135,502	98.30
1.2	Belanja Langsung (BL)	18,144,618,129	91.49	20,432,872,593	22.53

Berdasarkan realisasi indikator kinerja utama dan anggaran yang telah dicapai pada tahun 2018 maka perbandingan capaian kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/ RPJMD	KINERJA			ANGGARAN				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	(Rp.)	REALISASI	CAPAIAN (%)		
Tujuan/Sasaran										
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien										
1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi	B	B	B	100	82,305,688,350	12,481,456,451	15.16		

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPJMD	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	(Rp.)	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Banten (Nilai)							
Tujuan/Sasaran								
Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil dan Menengah, Nilai Tambah berbasis Sumber Daya Alam, Kapasitas Teknologi, Industri dan Kualitas SDM								
2	LPE Sektor Perindustrian (%)	3.7	3.7	3.61	97.57	3,272,207,150	3,128,582,600	95.61
Tujuan/Sasaran								
Meningkatnya Pangsa Pasar Dalam Negeri, Efisiensi dan Efektivitas Sistem Distribusi Daerah serta Wirausaha Baru Sektor Perdagangan								
3	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4	4	2.47	100 (Inflasi terkendali)	840,572,000	793,964,000	94.46
4	LPE Sektor Perdagangan (%)	4.9	4.9	7.25	153.27	4,293,412,500	4,028,869,542	93.84

Realisasi belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan rinci ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Belanja per Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih
			(Rp.)	(%)	
I	Program Tata Kelola Pemerintahan	82,305,688,350	12,481,456,451	15.16	69,824,231,899
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	60,342,800	57,582,800	95.43	2,760,000
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	236,089,400	189,417,400	80.23	46,672,000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	70,532,190,920	1,538,854,100	2.18	68,993,336,820
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	788,762,500	731,875,800	92.79	56,886,700
5	Penyediaan Barang dan Jasa	4,132,766,000	3,889,047,754	94.10	243,718,246

No.	URAIAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih
			(Rp.)	(%)	
	Perkantoran				
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	147,300,000	128,900,000	87.51	18,400,000
7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	2,137,842,680	2,032,209,098	95.06	105,633,582
8	Pengadaan Sarana Dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	296,000,000	291,268,900	98.40	4,731,100
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	333,864,000	331,926,400	99.42	1,937,600
10	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	984,256,700	934,130,760	94.91	50,125,940
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	350,807,650	331,790,000	94.58	19,017,650
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1,059,252,700	974,488,889	92.00	84,763,811
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	269,625,000	250,307,550	92.84	19,317,450
14	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	597,513,000	462,680,000	77.43	134,833,000
15	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	186,650,000	162,773,000	87.21	23,877,000
16	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	192,425,000	174,204,000	90.53	18,221,000
II	Program Peningkatan Daya Saing Industri	2,320,140,000	2,213,875,500	95.42	106,264,500
17	Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri	233,045,000	200,254,500	85.93	32,790,500
18	Perencanaan dan	450,660,000	422,200,000	93.68	28,460,000

No.	URAIAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih
			(Rp.)	(%)	
	Pengembangan Perwilayahian Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan				
19	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	719,425,000	709,721,000	98.65	9,704,000
20	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	917,010,000	881,700,000	96.15	35,310,000
III	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	952,067,150	914,707,100	96.08	37,360,050
21	Pengembangan dan Peningkatan Produk industri	522,067,150	506,219,100	96.96	15,848,050
22	Standarisasi dan Sertifikasi Industri	430,000,000	408,488,000	95.00	21,512,000
IV	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1,807,687,500	1,712,693,500	94.74	94,994,000
23	Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka	391,795,500	366,984,500	93.67	24,811,000
24	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan	575,320,000	551,745,000	95.90	23,575,000
25	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	608,980,000	591,056,000	97.06	17,924,000
26	Pengendalian Inflasi Daerah	231,592,000	202,908,000	87.61	28,684,000
V	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1,071,557,000	1,033,401,000	96.44	38,156,000
27	Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah	309,888,000	296,240,000	95.60	13,648,000
28	Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah	209,984,000	200,914,000	95.68	9,070,000
29	Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri	551,685,000	536,247,000	97.20	15,438,000
VI	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	1,472,490,000	1,337,953,092	90.86	134,536,908
30	Peningkatan Perlindungan Konsumen	1,280,000,000	1,145,977,492	89.53	134,022,508
31	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan	192,490,000	191,975,600	99.73	514,400

No.	URAIAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Selisih
			(Rp.)	(%)	
	Tertib Niaga				
VII	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	782,250,000	738,785,950	94.44	43,464,050
32	Peningkatan Pelayanan Mutu Barang	393,500,000	389,788,950	99.06	3,711,050
33	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi	388,750,000	348,997,000	89.77	39,753,000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	90,711,880,000	20,432,872,593	22.53	70,279,007,407

3.4 SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI)

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, baik SDM Disperindag Provinsi Banten, SDM dari Disperindag Kab/Kota maupun masyarakat dan *stake holder* yang membantu pencapaian target kinerja selama Tahun 2018.

3.4.1 PEGAWAI DISPERINDAG

Kualitas pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis dan misi yang telah ditetapkan. Secara makro akan turut pula menentukan tingkat keberhasilan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan tercapainya misi daerah, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 2022.

Kekuatan pegawai sebagai sumberdaya manusia disusun berdasarkan golongan/status kepegawaian, unit kerja, pendidikan dan kekuatan tingkatan jabatan (eselon).

a. Kekuatan Pegawai berdasarkan Golongan/Status Kepegawaian

Kekuatan pegawai ini diklasifikasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan golongan, Tenaga K1, Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Satuan Pengamanan dan Cleaning Service dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan/Status

No.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	4	4
4.	Kepala Balai	-	-	-	1	1
5.	Kepala Sub Bagian	-	-	3	1	4
6.	Kepala Seksi	-	-	12	4	16
7.	Pelaksana PNS	1	15	44	-	60
8.	Pelaksana K1/TKS	-	-	-	-	89
TOTAL		1	15	59	12	175

b. Kekuatan Pegawai berdasarkan Unit Kerja

Kekuatan pegawai diklasifikasi berdasarkan Unit Kerja dan terbagi menjadi 7 Unit Kerja, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Kekuatan Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Status (Org)			Jumlah (Org)
		PNS	CPNS	NON PNS	
1.	Sekretariat	19	---	45	65
2.	Bidang Industri	13	---	4	17
3.	Bidang Pengawasan	13	---	5	18
4.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	9	---	4	13
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	7	---	4	10
6.	UPTD PSMB	13	---	21	34
7.	UPTD PTSI	12	---	6	18
	Jumlah	86	---	89	175

c. Posisi Tingkatan Jabatan (Eselonering)

Kondisi tingkatan jabatan (eselonering) bagi pejabat struktural, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Kondisi Tingkatan Jabatan Pejabat Struktural

No.	Unit Kerja	Tingkatan Jabatan (Eselon)									Ket	
		Porsi			Terisi			Belum Terisi				
		II A	III A	IV A	II A	III A	IV A	II A	III A	IV A		
1.	Kepala	1			1			---				
2.	Sekretaris		1	3		1	3		---	---		
3.	Bidang Industri		1	3		1	3		---	---		
4.	Bidang Pengawasan		1	3		1	3		---	---		
5.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri		1	3		1	3		---	---		
6.	Bidang Perdagangan Luar Negeri		1	3		1	3		---	---		
7.	UPTD PSMB		1	3		1	3		---	---		
8.	UPTD PTSI		1	3		1	3		---	---		
	Jumlah	1	7	21	1	7	21	---	---	---		

3.4.2 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Sebagai penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan ditinjau dari segi urusannya porsi yang lebih luas berada pada Pemerintah Kab./Kota.

Pada setiap Kab./Kota telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, sebagai mitra kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam melaksanakan program/kegiatan, baik desentralisasi maupun dekonsentrasi.

Tabel 3.18
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab./Kota
yang membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kab./Kota	OPD yang membidangi Urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Ket.
1.	Kab. Serang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 OPD

No.	Kab./Kota	OPD yang membidangi Urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Ket.
2.	Kab. Pandeglang	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	1 OPD
3.	Kab. Lebak	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 OPD
4.	Kab. Tangerang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 OPD
5.	Kota Tangerang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 OPD
6.	Kota Cilegon	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 OPD
7.	Kota Serang	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1 OPD
8.	Kota Tangerang Selatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 OPD

3.4.3 MASYARAKAT PELAKU USAHA

Pada dasarnya pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, dan masyarakat yang akan menerima manfaat pembangunan. Masyarakat yang terkait langsung adalah para pelaku usaha (operator) yang bergerak dalam sektor industri dan perdagangan dan jasa keuangan, baik perorangan maupun badan hukum (koperasi/PT) dalam skala usaha kecil dan menengah.

Peran serta mereka dalam bermitra dengan pemerintah (*regulator*) tersimpul dalam suatu asosiasi dari pelaku usaha sejenis, seperti Kadin, Gapeknas, APRINDO, INAPLAS, Dekranasda, HIPMI, Gapensi, Gapeknas, Ardin dan sebagainya.

3.4.4 PERMASALAHAN

Disamping keberhasilan yang diperoleh, dirasakan pula beberapa kendala baik *internal* maupun *eksternal* organisasi, yaitu:

- *Internal*, antara lain disebabkan adanya kebijakan rotasi personel serta penetapan Perda baru yang mengatur susunan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi agar diperoleh satu persepsi yang sama dan selaras dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016. Disisi lain, antara pemahaman kinerja teknis dengan anggaran dalam suatu tupoksi pejabat pengelola kegiatan/anggaran belum berjalan optimal mengakibatkan belum seimbangnya antara *capaian kinerja keuangan* dengan *capaian kinerja pembangunan* sebagai dampak dari pelaksanaan program/kegiatan.

- *Eksternal*, antara lain: Koordinasi dengan berbagai *stake holder* belum berjalan secara maksimal, hal tersebut berpengaruh pada cakupan kualitas dan kuantitas atas capaian kinerja pembangunan. Minimnya informasi dan penguasaan pengetahuan atas tupoksi yang diampu oleh SDM Disperindag menjadi salah satu penyebab belum optimalnya koordinasi yang efektif dengan *stake holder*.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 PERMASALAHAN

Secara garis besar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah berhasil melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017 - 2022. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ditunjukkan dari realisasi indikator sebagai berikut:

- 1) Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten dengan nilai B
- 2) LPE Sektor Perindustrian dengan nilai mencapai 3.8%
- 3) Tingkat Inflasi Bahan Pokok berada dibawah 4% yaitu 2.47%
- 4) LPE Sektor Perdagangan dengan nilai mencapai 7.25%

Program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dilaksanakan dengan menjaga konsistensi implementasi Renstra Tahun 2017 - 2022. Pada periode tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah mengupayakan kinerja yang optimal, efisien dan efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya pencapaian target kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah merealisasikan anggaran dengan jumlah Rp. 35,638,008,095,- atau setara dengan 33.56% dari pagu anggaran Rp. 106,179,880,000,- sedangkan realisasi fisik yang dicapai adalah 35.05%.

Pada tahun 2018, realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja program dan sasaran karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten mengalami kendala dalam pelaksanaan pengadaan lahan Pusat Distribusi Provinsi Banten.

Pengadaan lahan dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu, tahap perencanaan (*feasibility study* dan dokumen perencanaan), tahap persiapan (survey lokasi, sosialisasi kepada masyarakat dan penentuan lokasi), tahap pelaksanaan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tahap pembayaran.

Belanja pengadaan lahan PDP yang terdapat pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 68,691,890,920,- dan hanya direalisasikan sebesar Rp. 476,333,100,- yang terdiri dari honorarium tim pengadaan lahan, koordinasi dan survey lokasi serta rapat - rapat persiapan. Pengadaan lahan PDP Provinsi Banten yang berlokasi di Desa

Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang belum dapat dibayarkan kepada masyarakat karena mengalami kendala keterbatasan waktu.

4.2 REKOMENDASI SOLUSI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan anggaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah melakukan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

- a. Melakukan *review* atas perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022, terutama *review* target kinerja program beserta indikatornya sehingga berorientasi *outcome* dan dapat menggambarkan kinerja utama yang akan dicapai. Evaluasi LKIP menunjukkan bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang belum menggambarkan indikator kinerja utama atau pun belum mencapai target indikator yang ditetapkan, antara lain:
 - (i) Program Tata Kelola Pemerintahan memiliki indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) karena kegiatan yang melekat pada program tersebut tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
 - (ii) Program Peningkatan Daya Saing Industri dan Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri belum mampu memberikan dorongan yang signifikan terhadap capaian LPE Sektor Perindustrian karena industri kecil menengah (IKM) hanya memiliki peran kecil terhadap peningkatan LPE Sektor Perindustrian di Provinsi Banten
 - (iii) Program Perdagangan Luar Negeri merupakan program yang tidak mencapai target surplus neraca perdagangan pada tahun 2018. Pada Bulan Desember 2018, Neraca Perdagangan Provinsi Banten mengalami defisit hingga 950.77 Juta USD. Hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai ekspor dan tingginya nilai impor pada tahun 2018. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Program Perdagangan Luar Negeri harus fokus dalam upaya mendorong peningkatan volume ekspor dan pengendalian impor daerah sehingga neraca perdagangan Provinsi Banten dapat mencapai surplus pada Tahun 2019.
- b. Optimalisasi fungsi perencanaan kinerja dan kegiatan khususnya bagi kegiatan pengadaan lahan PDP yang akan dilakukan perencanaan dan penganggaran ulang pada tahun 2019;
- c. Optimalisasi fungsi evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga mendukung fungsi evaluasi dan analisis capaian kinerja;

- e. Mengupayakan identifikasi dan analisis potensi sektor industri dan perdagangan baik yang berskala rumah tangga, kecil maupun besar yang berpotensi meningkatkan ekspor Provinsi Banten.